

Analisis PDRB sektor primer dan kesempatan kerja di Kabupaten Bungo

Anis Mayanti, Syaparuddin dan Erni Achmad

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

Abstract. This study aims to see the development of value-added primary sector and sub sectors of primary, value-added contribution of primary sector and sub sectors of GDP primary Bungo district, the elasticity of value added of primary sector and sub sector of primary employment in primary sectors and sub sectors and primary factors - factors that influence the development of value-added primary sector over the period 2001-2010. In this study researchers used secondary data in the form of time series (time series) from 2001 to 2010. Data analysis used a model that is descriptive and quantitative analysis and simple regression using ordinary least squares regression. The analysis perkembangan primary sector value added growth tends to fluctuate and the average is pretty good as well as occurring in the development of primary sub-sector. The contribution of primary sector value added and primary sub sector to GDP is quite large Bungo Regency. From the analysis of the elasticity of value added of primary sector employment relations are elastic, the elasticity of value added sub sector of primary employment sub-sectors that have a primary elastic relationships contained in the sub-sector value-added food crops, plantation crops, livestock and their products, fisheries sub-sector of forestry, mining and quarrying in the elastic. The results of estimation of the factors that influence the development of value-added primary sector Bungo district when viewed together (in unison) that direct government spending variables and labor can provide a positive influence on GDP growth in the primary sector Bungo Regency. Tests showed that the partial direct government spending variables have a significant effect on GDP growth in the primary sector, while labor variables had no significant effect of primary sector GDP growth during the study period 2001-2010.

Keywords: *Gross Domestic Product, Agricultural, Primary Sector*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan berlangsung secara berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya mencerminkan kemajuan suatu negara/daerah dalam proses pembangunan, walaupun banyak mendapat tanggapan dari para ekonom terutama mengenai distribusi pendapatan, namun tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan masih digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan mutlak untuk diperhatikan, karena pemerataan pembangunan bertujuan agar pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat dirasakan hasilnya oleh segenap lapisan masyarakat golongan ekonomi kuat dan lemah. Hal ini jelas akan memberi dampak positif terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat dan mendorong peningkatan peran masyarakat serta partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dimana pengaturan sumber daya diarahkan guna memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*Public Services*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisik, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya masyarakat (*pablik*) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan (3) meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan.

Menurut Arsyad (1999), Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang dilakukan bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang ada di daerah dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja yang baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbesar kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan, koordinasi, dan keterpaduan antar sektor. Pembangunan sektoral di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja baru

didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan kemauan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berasal dari pelayanan pemerintah daerah, kapasitas sosial ekonomi daerah, maupun dari sumber daya alam yang ada di daerah guna memacu pendapatan daerah yang lebih tinggi.

Kebijakan pembangunan daerah sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan, berasal dari perencanaan pembangunan yang memperhatikan kondisi perekonomian daerah tersebut dan perubahannya dalam jangka panjang. Untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah, PDRB merupakan salah satu indikator yang penting. Untuk itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PDRB.

Kabupaten Bungo yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi telah sejak lama melakukan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bungo sangat ditentukan keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan semua potensi. Untuk itu diharapkan apabila pengembangan struktur perekonomian berjalan dengan baik maka akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bungo.

Ekonomi Kabupaten Bungo dari tahun ketahun mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan selama 2001-2010 sebesar 6,18 persen pertahun, hal ini tidak terlepas dari peran sektor primer yang juga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,29 persen pertahun sehingga mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDRB Kabupaten Bungo, namun dari pertumbuhan yang dialami oleh sektor primer belum mampu memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap perkembangan kesempatan kerja pada

sektor primer dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,61 persen.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Bungo dari tahun 2001-2010 bahwa kontribusi sektor primer terhadap pembentukan perekonomian PDRB Kabupaten Bungo memberikan kontribusi yang cukup besar namun belum memberikan aksesibilitas terhadap penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan dan kontribusi nilai tambah sektor primer terhadap PDRB Kabupaten Bungo selama periode 2001-2010, menganalisis elastisitas nilai tambah sektor primer dan sub sektor primer terhadap kesempatan kerja sektor primer dan sub sektor primer Kabupaten Bungo selama periode 200-2010 dan yang terakhir menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah sektor primer Kabupaten Bungo selama periode 2001-2010.

METODE PENELITIAN

Untuk melihat perkembangan sektor primer dilihat melalui pola pertumbuhannya dan diformulasikan dengan rumus:

$$G_E = \frac{NT_i(t) - NT_i(t-1)}{NT_i(t-1)} \times 100 \%$$

Keterangan :

- G_E = Perkembangan nilai tambah sektor primer
 $NT_i(t)$ = Nilai tambah sektor primer tahun ke t
 $NT_i(t-1)$ = Nilai tambah sektor primer tahun ke - 1

- a. Untuk melihat kontribusi nilai tambah sektor primer dan sektor sub sektor primer terhadap PDRB Kabupaten Bungo digunakan rumus :

$$KT_p = \frac{NT_T(t)}{\Sigma PDRB_T(t)} \times 100 \%$$

Keterangan :

$KT_p(t)$ = Kontribusi nilai tambah sektor primer tahun t

$\Sigma PDRB_t$ = Total PDRB tahun t

t = Tahun pengamatan

Untuk melihat elastisitas nilai tambah sektor primer dan sub sektor primer terhadap penyerapan tenaga kerja sektor primer dan sub sektor primer pertahun selama periode penelitian 2001-2010, secara formulasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\epsilon_{KP_p} = \frac{\Delta NT_p}{\Delta K} \cdot \frac{K}{NT_p}$$

$$\epsilon_{KP_T} = \frac{\Delta NT_T}{\Delta K} \cdot \frac{K}{NT_T}$$

Keterangan :

ϵ_{KP_p} = Elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor primer

ϵ_{KP_T} = Elastisitas penyerapan tenaga kerja sub sektor primer

ΔNT_p = Laju pertumbuhan nilai tambah sektor primer

ΔK = Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor primer

ΔNT_T = Laju pertumbuhan nilai tambah sub sektor primer

K = Kesempatan kerja

NT_p = Nilai tambah sektor primer

NT_T = Nilai tambah sub sektor primer

Untuk pengujian hipotesa dalam penelitian ini, maka dilakukan estimasi dengan model *ordinay least suares* (OLS). Untuk menjawab permasalahan kedua dan pengujian hipotesa kedua menghitung elastisitas nilai tambah sektor primer terhadap kesempatan kerja sektor primer periode 2001-2010 di tetapkan model sebagai berikut :

$K_k = f(NTP)$

$\text{Log } K_k = \text{Log } \beta_0 + \beta_1 \text{Log } NT_p + e$

Keterangan :

K_k = Kesempatan kerja sektor primer
 β_0 = Konstanta
 β_1 = Elastisitas
 NT_p = Nilai tambah sektor primer (Rp)
 E = *error term*

Untuk menjawab hipotesa kedua menghitung elastisitas nilai tambah sub sektor primer terhadap kesempatan kerja sub sektor primer periode 2001-2010 di tetapkan model sebagai berikut :

$$K_k = f(NT_p)$$

$$\text{Log } K_k = \text{Log } \beta_0 + \beta_1 \text{Log } NT_p + e$$

Keterangan :

K_k = Kesempatan kerja sektor primer
 β_0 = Konstanta
 β_1 = Elastisitas
 NT_p = Nilai tambah sektor primer (Rp)
 E = *error term*

Untuk menganalisis hipotesa yang ke tiga mengetahui pengaruh belanja langsung pemerintah dan tenaga kerja terhadap nilai tambah sektor primer digunakan regresi berganda dengan rumus :

$$\text{Log } NT_i = \text{Log } \beta_0 + \beta_1 \text{Log } BLS + \beta_2 \text{Log } TK + e$$

Keterangan :

NT_i = Nilai tambah Sektor Primer Kabupaten Bungo (Rp)
 β = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien variabel bebas
 BLS = Belanja langsung pemerintah (Rp)
 TK = Tenaga kerja (orang)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan Rata-rata Perkembangan Nilai Tambah Sektor Primer Kabupaten Bungo

Hasil pencarian dengan menggunakan rumus pertumbuhan yang sederhana perkembangan dan rata-rata perkembangan nilai tambah sektor primer selama periode 2001-2010. Jika dilihat dari rata-rata perkembangan nilai tambah sektor primer perkembangan terendah terjadi pada

tahun 2009 sebesar 1,73 persen, tahun 2004 sebesar 2,25 persen, dan tahun 2003 sebesar 2,97 persen. Terjadinya penurunan perkembangan pada tahun 2009 disebabkan oleh berkurangnya kontribusi dari sektor pertambangan pada tahun tersebut, berkurangnya kontribusi ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Bungo menghentikan kegiatan operasional yang disebabkan oleh berbagai masalah mulai dari masalah perizinan sampai pada banyaknya masalah sosial yang berhubungan antara pihak perusahaan dengan masyarakat, penurunan persentase pada tahun 2004 di sebabkan oleh penurunan yang terjadi pada sub sektor kehutanan sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun tersebut dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang kehutanan sehingga berdampak pada kontribusi sektor tersebut. Sedangkan perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 13,22 persen tahun 2006 sebesar 10,66 persen dan tahun 2010 sebesar 10,10 persen hal ini disebabkan oleh pada tahun 2006 mulai beroperasinya pertambangan batu bara Kabupaten Bungo dan perkembangan pada tahun 2008 selain didukung oleh sub sektor pertambangan juga didukung oleh sub sektor penggalian yang mana pada tahun 2008 Kabupaten Bungo sedang giat membangun sehingga banyak menggunakan bahan baku yang bersumber dari sektor penggalian.

Kontribusi Nilai Tambah Sektor Primer dan Sub Sektor Primer terhadap PDRB Kabupaten Bungo.

Perkembangan PDRB Kabupaten Bungo sangat didukung oleh perkembangan nilai tambah sektor primer sedangkan perkembangan sektor primer merupakan cerminan dari perkembangan sub sektor primer Kabupaten Bungo. Perkembangan ini tidak terlepas dari sumbangan atau kontribusi dari setiap sub sektor primer Kabupaten Bungo. Nilai rata-rata kontribusi nilai tambah sektor primer terhadap PDRB Kabupaten Bungo sebesar

47,96 persen memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembentukan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo selama periode penelitian 2001-2010, hal ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Bungo sebagian besar masih menggantungkan kehidupan mereka pada sektor primer.

Elastisitas Nilai Tambah Sektor Primer dan Sub Sektor Primer terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer dan Sub Sektor Primer.

Elastisitas nilai tambah sektor primer terhadap kesempatan kerja di harapkan mempunyai hubungan yang elastis dimana laju pertumbuhan nilai tambah hendaknya mampu membuka kesempatan kerja. Elastisitas nilai tambah sektor primer terhadap kesempatan kerja sektor primer yang bersifat elastis adalah pada tahun 2009 sebesar 7,23 persen tahun 2010 sebesar 2, 75 persen tahun 2003 sebesar 1,54 persen tahun 2002 sebesar 0,39 persen, tahun 2004 sebesar -0,41 persen, tahun 2005 sebesar -0,27 persen, tahun 2006 sebesar 0,32 persen tahun 2007 sebesar 0,05 persen dan tahun 2008 sebesar 0,50 persen bersifat in elastis hal ini disebabkan kurangnya minat masyarakat pada pekerjaan sektor primer terutama generasi muda yang lebih memilih pekerjaan pada sektor lain karena mereka merasa tidak tepat jika bekerja pada sektor primer.

Elastisitas nilai tambah sub sektor tanaman pangan terhadap kesempatan kerja tanaman pangan pada tahun 2002 sebesar -0,56 persen dan tahun 2003 sebesar 0,36 bersifat in elastis pada tahun 2003 sebesar 1,16 persen tahun 2008 sebesar 1,78 persen tahun 2009 sebesar 1,84 tahun 2010 sebesar 2,35 persen elastis dan pada tahun selebihnya in elastis. Jika dilihat pada tahun – tahun yang bersipat elastis lebih banyak dari pada tahun yang bersifat in elastis menandakan sub sektor tanaman pangan ini masih diminati oleh masyarakat Kabupaten Bungo, karena pekerjaan pada

sektor ini merupakan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian asalkan mereka mempunyai tenaga maka dapat untuk melaksanakan kegiatan sub sektor tanaman pangan.

Elastisitas nilai tambah sub sektor tanaman perkebunan terhadap kesempatan kerja tanaman perkebunan pada tahun 2003 sebesar 1,16 persen tahun 2008 sebesar 1,78 persen 2009 sebesar 1,84 tahun 2010 sebesar 2,35 persen bersifat elastis dan pada tahun 2002 sebesar -0,26 persen tahun 2004 sbesar -0,17 persen tahun 2005 sebesar 0,28 tahun 2006 sebesar 0,12 tahun 2007 sebesar 0,16 persen bersifat in elastis. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bersipat elastis karena dari tahun 2008 tersebut masyarakat Kabupaten Bungo bealih dari sub sektor tanaman pangan ke sub sektor tanaman perkebunan, karena memang sub sektor tanaman perkebunan ini lebih menjanjikan.

Elastisitas nilai tambah sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap kesempatan kerja sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya pada tahun 2003 sebesar 1,51 persen tahun 2009 sebesar 1,63 tahun 2010 sebesar 2,34 persen bersifat elastis dan pada tahun 2002 sebesar -0,70 persen tahun 2004 sbesar -0,42 persen tahun 2005 sebesar 0,55 tahun 2006 sebesar 0,10 tahun 2007 sebesar 0,77 persen bersifat in elastis. Terdapat 3 (tiga) tahun yang bersifat elastis yakni pada tahun 2003, tahun 2008 dan tahun 2009 hal ini disebabkan oleh pada tiga tahun ini Pemerintah Kabupaten Bungo memberikan bantuan pada sub sektor ini, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pada sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya.

Elastisitas nilai tambah sub sektor kehutanan terhadap kesempatan kerja kehutanan pada tahun 2003 sebesar 3,78 persen tahun 2008 sebesar 47,61 persen tahun 2009 sebesar 5,87 persen 2010 sebesar 6,37 persen bersifat elastis dan pada tahun selebihnya bersifat in elastis sedangkan pada tahun 2002 sebesar -0,77 persen tahun 2004 sebesar 0,08 persen

tahun 2005 -0,33 persen tahun 2006 sebesar 0,61 persen tahun 2007 sebesar 0,81 persen bersifat in elastis. Meskipun mengalami perkembangan yang minus ternyata sub sektor kehutanan masih banyak menyerap tenaga kerja hal ini terbukti dari dari angka elastistas nilai tambah terhadap kesempatan kerja sektor kehutanan.

Elastisitas nilai tambah sub sektor perikanan terhadap kesempatan kerja perikanan pada tahun 2003 sebesar 2,82 persen tahun 2005 sebesar 1,17 persen tahun 2009 sebesar 2,48 persen 2010 sebesar 2,30 persen bersifat elastis dan pada tahun selebihnya bersifat in elastis sedangkan pada tahun 2002 sebesar -0,54 persen tahun 2004 sebesar 0,77 persen tahun 2006 sebesar 0,09 persen tahun 2007 sebesar 0,07 tahun 2008 sebesar 0,98 persen bersifat in elastis. Pada tahun yang bersifat elastis yakni pada tahun 2003, tahun 2005, tahun 2009 dan tahun 2010 hal ini disebabkan oleh bantuan Pemerintah Kabupaten Bungo memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bibit ikan keramba sehingga banyak masyarakat yang menekuni sub sektor perikanan.

Elastisitas nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas terhadap kesempatan kerja pertambangan tanpa migas pada tahun 2010 sebesar 2,74 persen bersifat elastis dan pada tahun selebihnya bersifat in elastis sedangkan tahun 2007 sebesar 0,08 persen tahun 2009 sebesar -0,96 persen bersifat in elastis. Sesuai dengan kegiatan pada sub sektor pertambangan yang lebih padat modal dari pada padat karya sehingga kurang menyerap tenaga kerja, hanya pada tahun 2010 yang bersifat elastis.

Elastisitas nilai tambah sub sektor penggalian terhadap kesempatan kerja penggalian selama tahun penelitian 2001-2010 tidak ada yang bersifat elastis periode penelitian elastisitas nilai tambah sub sektor penggalian bersifat in elastis. Hal ini menandakan bahwa nilai tambah sub sektor penggalian tidak mampu menyerap tenaga

kerja atau dapat dikatakan hubungan antara laju pertumbuhan nilai tambah sektor penggalian dengan kesempatan kerja bersifat regresif (Manurung 2001).

Hasil Estimasi Rata-rata Elastisitas Nilai Tambah Sektor Primer dan Sub Sektor Primer terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer dan Sub Sektor Primer.

Untuk melihat rata-rata elastisitas nilai tambah sektor primer dan sub sektor terhadap kesempatan kerja sektor primer dan sub sektor primer selama periode penelitian 2001-2010, maka dilakukan estimasi dengan model *Ordinary Least Square (OLS)* dengan menggunakan Eviews 4.1. Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa terdapat sub sektor yang mempunyai hubungan yang elastis dan tidak elastis terhadap kesempatan kerja sub sektor, berikut hasil estimasi elastisitas nilai tambah sektor primer terhadap kesempatan kerja sektor primer Kabupaten Bungo di dapat model persamaan sebagai berikut :

$$\text{Log } K_k = -1.845506 + 1.480053 \text{ Log } \text{KKSP}$$

$$t - \text{stat} : 5.504350$$

$$t - \text{tabel} : 1.89 (\alpha = 05 \%)$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai elastisitas nilai tambah sektor primer terhadap kesempatan kerja adalah sebesar 1.480053 dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai tambah sektor primer terhadap kesempatan kerja bersifat elastis. Dari persamaan diatas koefisien regresi variabel nilai tambah sektor primer bernilai positif, berarti dengan meningkatnya nilai tambah sektor primer akan diikuti pertumbuhan kesempatan kerja sektor primer Kabupaten Bungo. Setiap kenaikan nilai tambah sektor primer sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan kesempatan kerja sektor primer sebesar 1.480053 persen di Kabupaten Bungo periode 2001-2010.

Nilai tambah sektor primer berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja sektor primer Kabupaten Bungo. Untuk mengetahui elastisitas nilai tambah sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, perikanan, pertambangan tanpa migas dan penggalian terhadap kesempatan kerja tanaman pangan di Kabupaten Bungo periode 2001-2010 dilakukan analisis regresi sederhana maka di dapat hasil persamaan sebagai berikut :
Rata-rata Elastisitas Nilai Tambah Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap Kesempatan Kerja

$$\text{Log } K_k = -5.412641 + 1.968215 \text{ Log NTPTP}$$

$$t - \text{stat} : 4.755080$$

$$t - \text{tabel} : 1.89 (\alpha = 05 \%)$$

bahwa nilai elastisitas nilai tambah sub sektor tanaman pangan terhadap kesempatan kerja adalah sebesar 1.968215 dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai tambah sub sektor tanaman pangan terhadap kesempatan kerja bersifat elastis. Dari persamaan diatas koefisien regresi variabel nilai tambah sektor primer bernilai positif, berarti dengan meningkatnya nilai tambah sub sektor tanaman pangan akan diikuti pertumbuhan kesempatan kerja sub sektor tanaman pangan Kabupaten Bungo. Setiap kenaikan nilai tambah sub sektor tanaman pangan sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan kesempatan kerja sub sektor tanaman pangan sebesar 1.968215 persen di Kabupaten Bungo periode 2001-2010. Nilai tambah sub sektor tanaman pangan berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja sub sektor tanaman pangan Kabupaten Bungo.

Rata-rata Elastisitas Nilai Tambah Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap Kesempatan Kerja

$$\text{Log } K_k = 1.961333 + 0.507092 \text{ Log NTTNMPRKBN}$$

$$t - \text{stat} : 3.737189$$

$$t - \text{tabel} : 1.89 (\alpha = 05 \%)$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai elastisitas nilai tambah sub sektor tanaman perkebunan terhadap kesempatan kerja adalah sebesar 0.507092 dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai tambah sub sektor tanaman perkebunan terhadap kesempatan kerja bersifat in elastis. Dari persamaan diatas koefisien regresi variabel nilai tambah sub sektor tanaman perkebunan bernilai positif, berarti dengan meningkatnya nilai tambah sub sektor tanaman perkebunan akan diikuti pertumbuhan kesempatan kerja sub sektor tanaman perkebunan Kabupaten Bungo. Setiap kenaikan nilai tambah sub sektor tanaman pangan sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan kesempatan kerja sub sektor tanaman perkebunan sebesar 0.507092 persen di Kabupaten Bungo periode 2001-2010. Nilai tambah sub sektor tanaman perkebunan berpengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja sub sektor tanaman perkebunan Kabupaten Bungo.

Hasil estimasi elastisitas nilai tambah sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap kesempatan kerja

$$\text{Log } K_k = 0.802056 + 0.709458 \text{ Log NTPTRNKN}$$

$$t - \text{stat} : 6.970763$$

$$t - \text{tabel} : 1.89 (\alpha = 05 \%)$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai elastisitas nilai tambah sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap kesempatan kerja adalah sebesar 0,709458 dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai tambah sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap kesempatan kerja bersifat in elastis. Dari persamaan diatas koefisien regresi variabel nilai tambah sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya bernilai positif, berarti dengan meningkatnya nilai tambah sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya akan diikuti pertumbuhan kesempatan kerja sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya Kabupaten Bungo. Setiap kenaikan nilai tambah sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya

sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan kesempatan kerja sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 0,709458 persen di Kabupaten Bungo periode 2001-2010. Nilai tambah sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya berpengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya Kabupaten Bungo.

Hasil estimasi elastisitas nilai tambah sub sektor kehutanan terhadap kesempatan kerja sub sektor kehutanan Kabupaten Bungo.

$$\text{Log } K_k = 3.537 - 0.068 \text{ Log NTKHUTNN}$$

$$t\text{-stat} : -0.068323$$

$$t\text{-tabel} : 1,89 (\alpha = 05 \%)$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai elastisitas nilai tambah sub sektor kehutanan terhadap kesempatan kerja adalah sebesar - 0.068323 dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai tambah sub sektor kehutanan terhadap kesempatan kerja bersifat in elastis. Dari persamaan diatas koefisien regresi variabel nilai tambah sub sektor kehutanan bernilai negatif, berarti dengan meningkatnya nilai tambah sub sektor kehutanan tidak diikuti pertumbuhan kesempatan kerja sub sektor kehutanan Kabupaten Bungo. Setiap kenaikan nilai tambah sub sektor kehutanan sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan kesempatan kerja sub sektor perikanan sebesar - 0.068323 persen di Kabupaten Bungo periode 2001-2010. Nilai tambah sub sektor kehutanan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja sub sektor kehutanan Kabupaten Bungo. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan dari Instruksi dari Pemerintah Pusat yang berimbas ke Pemerintah Daerah dalam menetapkan pengelolaan hutan dengan peraturan yang ketat sehingga banyak usaha di bidang kehutanan mengurangi produksinya.

Hasil estimasi elastisitas nilai tambah sub sektor perikanan terhadap kesempatan kerja sub sektor perikanan Kabupaten Bungo.

$$\text{Log } K_k = 0.971 + 0.746 \text{ Log NTPRIKNN}$$

$$t\text{-stat} : 5,508123$$

$$t\text{-tabel} : 1,89 (\alpha = 05 \%)$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elastisitas nilai tambah sub sektor perikanan terhadap kesempatan kerja adalah sebesar 0,746278 dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai tambah sub sektor perikanan terhadap kesempatan kerja bersifat in elastis. Dari persamaan diatas koefisien regresi variabel nilai tambah sub sektor perikanan bernilai positif, berarti dengan meningkatnya nilai tambah sub sektor perikanan akan diikuti pertumbuhan kesempatan kerja sub sektor perikanan Kabupaten Bungo. Setiap kenaikan nilai tambah sub sektor perikanan sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan kesempatan kerja sub sektor perikanan sebesar 0,746278 persen di Kabupaten Bungo periode 2001-2010. Nilai tambah sub sektor perikanan berpengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja sub sektor perikanan Kabupaten Bungo.

Hasil estimasi elastisitas nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas terhadap kesempatan kerja sub sektor pertambangan tanpa migas Kabupaten Bungo.

$$\text{Log } K_k = 2,138 + 0,135 \text{ Log NTPRTMBGN}$$

$$t\text{-stat} : 1,475189$$

$$t\text{-tabel} : 1,89 (\alpha = 05 \%)$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai elastisitas nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas terhadap kesempatan kerja adalah sebesar 0,135275 dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas terhadap kesempatan kerja bersifat in elastis. Dari persamaan diatas

koefisien regresi variabel nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas bernilai positif, berarti dengan meningkatnya nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas akan diikuti pertumbuhan kesempatan kerja sub sektor pertambangan tanpa migas Kabupaten Bungo. Setiap kenaikan nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan kesempatan kerja sub sektor pertambangan tanpa migas sebesar 0,135275 persen di Kabupaten Bungo periode 2001-2010. Nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja sub sektor pertambangan tanpa migas Kabupaten Bungo. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan pertambangan di Kabupaten Bungo tidak padat karya namun padat modal sehingga tidak menyerap tenaga kerja Kabupaten Bungo yang banyak.

Hasil estimasi elastisitas nilai tambah sub sektor penggalian terhadap kesempatan kerja sub sektor penggalian Kabupaten Bungo.

$$\text{Log } K_k = 2,648788 + 0,135830 \text{Log NTPENGGALIAN}$$

$$t\text{-stas} : 1,772339$$

$$t\text{-tabel} : 1,89 (\alpha = 05 \%)$$

nilai elastisitas nilai tambah sub sektor penggalian terhadap kesempatan kerja adalah sebesar 0,135830 dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai tambah sub sektor penggalian terhadap kesempatan kerja bersifat in elastis. Dari persamaan diatas koefisien regresi variabel nilai tambah sub sektor penggalian bernilai positif, berarti dengan meningkatnya nilai tambah sub sektor penggalian akan diikuti pertumbuhan kesempatan kerja sub sektor penggalian Kabupaten Bungo. Setiap kenaikan nilai tambah sub sektor penggalian sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan kesempatan kerja

sub sektor penggalian sebesar 0,135830 persen di Kabupaten Bungo periode 2001-2010. Nilai tambah sub sektor penggalian tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja sub sektor penggalian Kabupaten Bungo.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Nilai Tambah Sektor Primer Kabupaten Bungo

Pengaruh Belanja Langsung Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap perkembangan nilai tambah sektor primer Kabupaten Bungo terlihat pada persamaan dibawah ini :

$$\text{Log } Y = 0,972069 + 0,254 \text{ log BLS} + 0,348 \text{ log TK}$$

$$t\text{-tes} \quad \quad \quad (7,748) \quad \quad (1,528)$$

$$\text{BLS} = \text{Belanja Langsung Pemerintah}$$

$$R^2 = 0,9197$$

$$\text{TK} = \text{Tenaga Kerja}$$

$$F_{tes} = 40.119$$

$$F_{tabel} = 4.74$$

$$t\text{-tabel} = 1,89$$

Dari masing-masing *variabel dependent* (variabel terikat) dan *variabel independent* (variabel bebas) yang disertakan dalam model diatas diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9720689 berarti secara keseluruhan variabel yaitu belanja langsung pemerintah dan tenaga kerja mampu menjelaskan variasi pertumbuhan PDRB sektor primer sebesar 91,97 persen selama kurun waktu yang diteliti, sedangkan sisanya sebesar 8,03 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model estimasi.

Bila dilihat secara bersama-sama (serentak) dari masing-masing variabel bebasnya berarti belanja langsung pemerintah dan tenaga kerja mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB sektor primer Kabupaten Bungo pada tingkat keyakinan 95 persen. Hal ini dapat dilihat dari nilai F

statistik sebesar 40,11 > dari F tabel (2:7) sebesar 4,74 pada α 5 %.

Berdasarkan uji t-statistik (uji secara parsial) dapat di ketahui bahwa variabel belanja langsung pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB sektor primer Kabupaten Bungo namun variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Sektor Primer Kabupaten Bungo selama periode penelitian 2001-2010. Berikut dapat dilihat hasil uji t dari masing-masing variabel :

a. Belanja Langsung Pemerintah

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja langsung pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB sektor primer Kabupaten Bungo. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat belanja langsung pemerintah maka pertumbuhan PDRB sektor primer meningkat. Koefisien regresi belanja langsung pemerintah sebesar 0,254 persen berarti bahwa apabila belanja langsung pemerintah dinaikan sebesar 1 persen maka pertumbuhan PDRB sektor primer meningkat sebesar 0,254 persen.

Berdasarkan dari hasil koefisien regresi tersebut diketahui bahwa pengaruh belanja langsung pemerintah terhadap pertumbuhan PDRB sektor primer tergolong rendah di karenakan pengaruh belanja langsung pemerintah untuk tahun berjalan, khususnya pembangunan hanya memberikan dampak pada tahun selanjutnya, karena manfaat yang di peroleh publik dari pembangunan tersebut lebih besar setelah pembangunan selesai. Pada tahun berjalan belanja langsung pemerintah lebih mempengaruhi pajak.

Dari hasil pengujian $t_{\text{-statistik}}$ di peroleh nilai 7,92 yang lebih besar di bandingkan $t_{\text{-tabel}}$ (α 05 % = 1.89). Hal ini berarti bahwa variabel belanja langsung pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB sektor primer. Berdasarkan perumusan hipotesa

maka $H_0 : \beta = 0$ di tolak dan menerima $H_a : \beta \neq 0$ di terima berarti belanja langsung pemerintah terdapat pengaruh yang signifikan secara partial terhadap PDRB sektor primer Kabupaten Bungo.

b. Tenaga kerja

Hasil estimasi menunjukan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB sektor primer Kabupaten Bungo. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat jumlah tenaga kerja maka pertumbuhan PDRB sektor primer meningkat. Koefisien regresi jumlah tenaga kerja sebesar 0,329 persen berarti bahwa setiap peningkatan jumlah tenaga kerja 1 persen maka menyebabkan pertumbuhan PDRB sektor primer meningkat sebesar 0,329 persen.

Berdasarkan dari hasil koefisien regresi tersebut diketahui bahwa pengaruh tenaga kerja lebih dominan terhadap pertumbuhan PDRB sektor primer di bandingkan dengan belanja langsung pemerintah. Hal ini terutama disebabkan tenaga kerja berhubungan dengan tiga komponen yang turut mempengaruhi pertumbuhan PDRB sektor primer yaitu pajak, konsumsi dan tabungan. Selain itu tenaga kerja mempunyai andil yang cukup besar dalam menggerakan sektor riil, karena pada umumnya aktivitas usaha di Kabupaten bungo yang bersifat padat karya.

Namun bila dilihat dari hasil pengujian $t_{\text{-statistik}}$ di peroleh nilai 1,451 yang lebih kecil di bandingkan $t_{\text{-tabel}}$ (α 05 % = 1.89). Hal ini berarti bahwa variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB sektor primer. Berdasarkan perumusan hipotesa maka $H_0 : \beta = 0$ di terima dan menolak $H_a : \beta \neq 0$ di terima berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara partial terhadap PDRB sektor primer Kabupaten Bungo. Hal ini menunjukan bahwa tenaga kerja yang banyak belum tentu akan dapat menambah produksi jika keahlian dan ketrampilan tidak dimiliki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada beberapa bagian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan rata-rata nilai tambah sektor primer sebesar 5,29 persen pertahun. Kontribusi nilai tambah sektor primer terhadap PDRB Kabupaten Bungo sebesar 47,96 persen,.
2. Elastisitas nilai tambah sektor primer terhadap kesempatan kerja sektor primer Kabupaten Bungo selama periode 2001-2010 elastis, sedangkan elastisitas nilai tambah sub sektor primer terhadap kesempatan kerja sub sektor primer periode 2001-2010 yang bersifat elastis hanya sub sektor tanaman pangan, sedangkan sub sektor tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, perikanan, pertambangan tanpa migas dan sub sektor penggalian in elastis
3. Sercara simultan variabel belanja langsung pemerintah dan kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap nilai tambah sektor primer, namun secara partial tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tambah sektor primer.

Daftar Pustaka

- Ananda, Fengki.2007 *Analisis Elastisitas Kesempatan Kerja Subsektor Perkebunan Di Provinsi Jambi*, Tesis MEP Unja. (tidak dipublikasikan)
- Anonim (1998), *Indikator Ekonomi*, Badan Pusat statistic, berbagai edisi
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi 1*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Budiono, 1991. *Pengantar Ekonomi Makro*. Penerbit BPFE – UGM 171
- , 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi 1*. Cetakan VI, Yogyakarta BPFE
- BPS, 2006. *Petunjuk Praktis Menghitung PDRB*, BPS Kab. Bungo.
- Cecep Suyudi, M, 2007. *Kontribusi Sektor Pertanian terhadap kesempatan kerja*.
<http://www.pksyariahimmciputat.blog.spot.com>
- Dadang Solihin, 2005 *Teori-Teori pembangunan sebuah analisis komparatif*.
<http://www.Slidehare.net/DadangSolihin/Teoriteori-pembangunan-sebuah-analisis-komparatif>
- Deneiy, AP, 2006. *Disorientasi Anggaran dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Ekofeum, Malang
- Dumayry, 1997. *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Sumitro Djojohadikusumo, 1985. *Ekonomi Pembangunan*, Gramedia, Jakarta
- , 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Cet. 1, LP3ES Jakarta.
- Sumitro Djojohadikusumo, 1994, *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3S, Jakarta.
- Erwin Tobing, 2007. *Pengangguran tenaga kerja terdidik*, jurnal kajian strategis gemanusa, Jawa Tengah
- Esmara, H, 1986. *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. Gramedia Jakarta
- Harahap. Lokot Muda, 2002. *Analisis Perkembangan Sektoral dalam kegiatan Ekonomi Kabupaten Langkat*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana USU (tidak dipublikasikan),
- Hakim, Abdul. 2004. *Ekonomi Pembangunan, Ekonisia*, Yogyakarta
- Joni, Harmes, 2002, 2007. *Analisis Pertumbuhan dan Proses Transpormasi Struktur Ekonomi Regional Kota Medan*, Tesis S2, Program Pasca Sarjana USU

- Jhingan, ML.1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Persada Grafindo, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPPAMPYKPN, Yogyakarta
- Lincoln Arsyad, 1999, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Manurung, M. Dan Raharja P, 2001. *Teori Ekonomi Makro*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Prihanto Hari, Purwaka, Saifuddin.1996. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi*, Jurnal Manajemen dan Pembangunan, Edisi V FE Unja
- Rahardjo, M. Dawam. 1987. *Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Krisis*. Jakarta: LP3ES.
- Syafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Volume 3, Prisma
- Sinungan, Mucdarsyah, 1997. *Produktifitas Apa dan Bagaimana*, Edisi 2, Cet.3 Bumi Aksara, Jakarta.
- Soeparmoko,1999. *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Soedarsono, 1992. *Teori Ekonomi Mikro*, LPRES, Jakarta.
- Sukirno, 1985, *Ekonomi Pembangunan, Masala dan Dasar Kebijakan*, Bort, Medan
- Sukirno Sadono, 1999. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Edisi 2. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- ,1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Supriyadi, Diydy Ika. *Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia*.
http://www.adypato.files.wordpress.com/Perubahan_struktur_ekonomi_Indonesia
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, P.Michael,1994. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Edisi 4, Jilid 1 dan 2*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Todaro, P. Michael, 1999. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Edisi kelima
- Tulus, Tambunan, 2001. *Transformasi Ekonomi Indonesia, Teori dan Empiris*. Penerbit Salemba Empat. Edisi Pertama, Jakarta
- Tulus Tambunan, 2003. *Perekonomian Indonesia Beberapa Persoalan Penting*, Cetakan pertama. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wijaya, Farid, 1992. *Kompendium Ekonomika, Ekonomika Pertumbuhan dan Internasional, Edisi I, Volume IV*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Widodo, Hg.Suseno Triyanto, 1993. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Cet III. Kanisus, Yogyakarta